

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka tentu memiliki cita-cita mencapai kemakmuran sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang dasar 1945. Indonesia adalah negeri yang sangat luas terdiri dari ±13 ribu pulau yang membentang dari Talaud sampai Pulau Rote di garis khatulistiwa. Pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat memiliki tugas besar untuk mewujudkan impian Indonesia sejahtera dengan berbekal potensi dan kekayaan yang dimiliki. Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah harus mampu mengatasi segala permasalahan yang dihadapi. Pemerintah pusat hingga pemerintahan tingkat desa harus saling bahu membahu mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan pemerintahan yang adil serta bertanggungjawab.

Setiap negara di dunia berlomba-lomba untuk mencapai sebuah kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya termasuk Indonesia. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, negara-negara tersebut

mengambil beberapa kebijakan salah satunya kebijakan melalui peningkatan pembangunan ekonomi. Untuk mengkaji keberhasilan pembangunan ekonomi sangatlah penting dengan memahami distribusi pendapatan.

Distribusi pendapatan merupakan suatu ukuran pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi tidak akan cukup apabila indikator tolok ukurnya hanya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan per kapita saja. Tiada artinya ketika laju pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan per kapita meningkat namun terjadi ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan.

Salah satu cara untuk meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan melaksanakan program pembangunan ekonomi. Suryono (2000, hal. 5) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dalam jangka yang panjang. Pembangunan ekonomi yang dilakukan secara berkelanjutan dan baik, akan meningkatkan distribusi pendapatan

masyarakat dan secara tidak langsung akan berimbas juga pada pertumbuhan ekonomi.

Cara yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah rasio gini. Rasio gini merupakan alat ukur ketidakadilan distribusi pendapatan (*inequality income distribution*) dengan menghitung luas kurva Lorenz.¹ Dalam rasio gini jika koefisiennya semakin mendekati nol menandakan tingkat distribusi pendapatan merata. Akan tetapi, jika koefisiennya semakin besar atau mendekati angka satu maka hal itu menandakan distribusi kian tidak merata.

Secara nasional, nilai indeks gini Indonesia selama periode 2012-September 2014 mengalami fluktuasi namun pada bulan Maret 2015 hingga bulan September 2019 nilai indeks gini terus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015 hingga bulan September 2019 telah terjadi perbaikan tingkat ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2019, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebagai provinsi yang

¹Prathama Rahardja dan Mandala manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), Edisi ketiga, h. 247.

memiliki nilai indeks gini tertinggi yaitu sebesar 0,426. Sedangkan indeks gini terendah adalah Provinsi Bangka Belitung dengan indeks gini sebesar 0,266.

Todaro (2006:118) membagi tiga komponen penting pertumbuhan ekonomi, pertama adalah akumulasi modal, kedua adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah populasi penduduk terbanyak di dunia. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu membawa dampak positif sekaligus negatif bagi perekonomian suatu daerah. Dapat berdampak positif ketika peningkatan populasi penduduk diimbangi dengan kesempatan kerja atau lapangan kerja yang banyak. Ketika peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang dibutuhkan maka akan membawa dampak negatif bagi perekonomian.

Permasalahan yang muncul terkait kependudukan tidak hanya terbatas pada jumlah yang banyak semata akan tetapi ada masalah lain di bidang kependudukan yaitu kualitas sumber daya

manusia/penduduk, persebaran penduduk, tingkat konsumsi dan lain sebagainya. Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang baru lahir tetapi di sisi lain akan berkurang oleh kematian pada semua tingkatan usia. Dalam konteks spasial mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk, dimana imigrasi akan menambah jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah.²

Berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) nasional, Provinsi Jawa Barat memiliki penduduk terbanyak di tahun 2019 yaitu berjumlah 49.316.700 penduduk, kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 39.698.600 penduduk. Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 742.200 penduduk.

²Eny Rochaida, "Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur", Vol. 18 No. 1 (2016) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, h. 14.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan salah satunya karena ketersediaan lapangan kerja di sektor primer lebih banyak terdapat di kota dibandingkan di desa. Pemerintah mengambil kebijakan penyesuaian upah minimum setiap tahunnya dan meninjaunya secara berkala. Kepentingan pekerja dan kemampuan pengusaha dalam membayar upah adalah aspek yang menjadi bahan pertimbangan utama pemerintah dalam menetapkan besarnya kenaikan upah minimum. Selain itu, kenaikan upah minimum diharapkan mampu memperbaiki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang ada.

Ketimpangan distribusi pendapatan memiliki dampak yang besar sehingga pemerintah pusat dan daerah harus saling bekerja sama memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Oleh sebab itu, kajian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan sangatlah diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Pengaruh**

Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2019”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka berikut ini adalah uraian identifikasi masalahnya:

1. Pada tahun 2019, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebagai provinsi yang memiliki nilai indeks gini tertinggi yaitu sebesar 0,426.
2. Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah populasi penduduk terbanyak di dunia.
3. Provinsi Jawa Barat memiliki penduduk terbanyak di tahun 2019 yaitu berjumlah 49.316.700 penduduk, kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 39.698.600 penduduk.
4. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan salah satunya karena ketersediaan lapangan kerja di sektor primer lebih banyak terdapat di kota dibandingkan di desa.

5. Kenaikan upah minimum yang terjadi setiap tahunnya diharapkan mampu memperbaiki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang ada.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Maka dari itu, penulis membatasinya hanya yang berkaitan dengan “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia tahun 2019”. Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan indeks gini sebagai indikator pengukurannya. Data yang digunakan hanya pada tahun 2019 saja yang didapat dari statistik Indonesia 2020 dengan rormat pdf yang diterbitkan oleh BPS nasional.

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2019?

2. Seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2019?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk dan upah minimum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2019?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2019.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh upah minimum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2019.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk dan upah minimum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2019.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

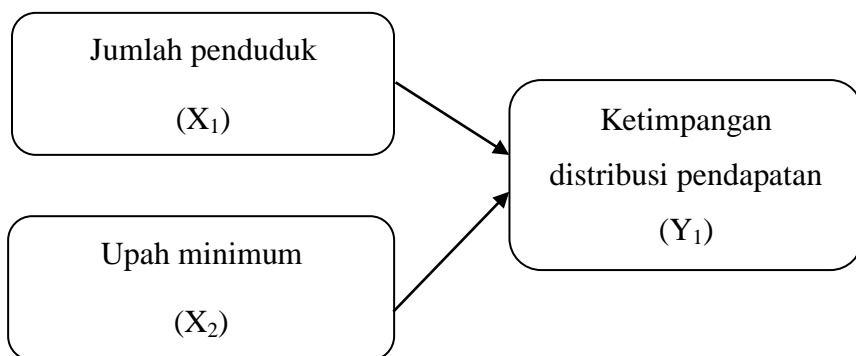
Selain dapat menjawab permasalahan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk tugas baik dalam bentuk makalah maupun penelitian.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan umum mengenai pertumbuhan jumlah penduduk, upah minimum dan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk dan upah minimum, sedangkan variabel terikatnya adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi

pendapatan adalah indeks gini/*gini ratio*. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan upah minimum terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.



H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibuat secara singkat dan sistematis yang disusun dalam beberapa bab dengan berpedoman pada penulisan karya ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang terdiri dari bab I pendahuluan, bab II kajian teoritis, bab III metode penelitian, bab IV pembahasan dan hasil penelitian, dan bab V kesimpulan dan

saran. Untuk masing-masing isi setiap bagian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teoritis: Dalam bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini membahas secara rinci tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data hingga teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian: Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasan analisis terpadu.

Bab V Kesimpulan dan Saran: Di bab terakhir ini memuat tentang kesimpulan dari objek yang telah diteliti penulis berdasarkan data yang didapat dari lembaga resmi pemerintah dan saran yang ditujukan untuk pihak-pihak tertentu.